

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
			<input checked="" type="checkbox"/>										

Perusahaan Aspal Disegel Diduga Terkait Perkara Korupsi

Polisi masih menunggu audit BPK untuk mengetahui berapa kerugian negara dari dugaan korupsi pengerjaan jalan nasional tersebut.

ASRUL SEPTIAN MALIK

DIREKTORAT Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menyegel perusahaan pengaspalan, PT Usaha Remaja Mandiri (URM) di Jalan *by pass* Soekarno-Hatta, Way Laga, Panjang, Jumat (26/3).

Informasi yang didapat *Lampung Post*, ada beberapa titik yang diberi garis polisi. Dua di antaranya ruang petinggi di kantor tersebut, satu ruang administrasi, satu alat *mixing* aspal, dan sebuah drum berisi aspal.

Setidaknya terdapat dokumen yang disita petugas Subdit III Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Lampung, yang dimuat dalam tiga koper, satu CPU, serta *sample* aspal dari perusahaan.

Penyegelan diduga dilakukan terkait perkara tindak pidana korupsi pengerjaan preservasi rekons-

truksi jalan Prof Dr Ir Sutami—Sribhawono—Sp Sribhawono tahun anggaran 2018 dengan nilai mencapai Rp147 miliar, yang telah naik ke tingkat penyidikan.

"Iya benar tadi ada giat tersebut (penyegelan) heberapa disita," ujar Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Mestron Siboro kepada *Lampung Post*, Jumat (26/3).

Menurut Mestron, aparat masih menunggu hasil lab Politeknik Negeri Bandung terkait kualitas aspal yang digunakan.

Petugas saat ini juga tengah menunggu audit BPK untuk mengetahui berapa kerugian negara dari dugaan korupsi pengerjaan jalan nasional, yang dikerjakan Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Lampung itu.

Sebelumnya diberitakan *Lampung Post*, proyek jalan nasional Ir Sutami-Sribhawono-Simpang Sribhawono tahun 2018-2019 menjadi atensi Polda Lampung.

Ia menerangkan jalan tersebut merupakan jalan utama yang menghubungkan beberapa provinsi di pulau Sumatera. Jalan tersebut sangat diandalkan pengguna jalan, terutama yang tidak ingin melintasi Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTs).

Jalan nasional tersebut kewenangannya berada di Balai Pengelolaan Jalan Nasional (BPJN) serta penganggaran ada di Pemerintah Pusat. Namun, DPRD Lampung memiliki kewenangan mengawasi.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung melalui Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi mulai menyelidiki dalam perkara dugaan korupsi proyek nasional tersebut.

Dirreskrimsus Polda Lampung, Kombes Mestron Siboro mengatakan pihaknya tengah menyelidiki proyek jalan tersebut. "Sedang kami selidiki, data-datanya sedang kami kumpulkan," kata dia.

“

Iya benar tadi ada giat tersebut (penyegelan) beberapa disita.

Dia menjelaskan, saat ini Tim Penyidik Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus masih mendalami terkait proyek jalan

yang diduga asal jadi tersebut. "Kami intensif pemeriksaan dengan memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangan," ujarnya.

Ditanya apakah sudah memanggil kontraktor pengerjaan jalan serta Balai Pengelolaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah I Provinsi Lampung, Kombes Siboro mengatakan masih dijadwalkan. "Kami jadwal-

kan dulu. Intinya kami intensifkan pemeriksaannya," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Lampung, Midi Iswanto mengatakan ruas Jalan Ir Sutami-Sribhawono-Simpang Sribhawono merupakan jalan nasional yang memerlukan perlakuan dan perawatan secara khusus.

"Ketika ditemukan hal yang kurang benar, maka harus diluruskan. Nanti akan kami panggil balainya (BPJN) untuk menanyakan seperti apa pelaksanaannya di lapangan," ujar Midi. (KI)